

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang "Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati)". Gambaran umum ini meliputi letak geografis, pemerintahan, jumlah penduduk, aspek sosial dan politik desa wotan dan baturejo, gambaran mengenai jumlah data pemilih tetap di Desa Wotan dan Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati, serta rekapitulasi hasil suara. Disamping itu, pembahasan mengenai hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka fokus hasil penelitian ini yaitu mengenai ; realitas pemilihan umum serentak 2019, partisipasi masyarakat, serta problematika yang didapat pada saat pemilihan umum serentak 2019 ini dilaksanakan.

A. Gambaran Obyek Penelitian

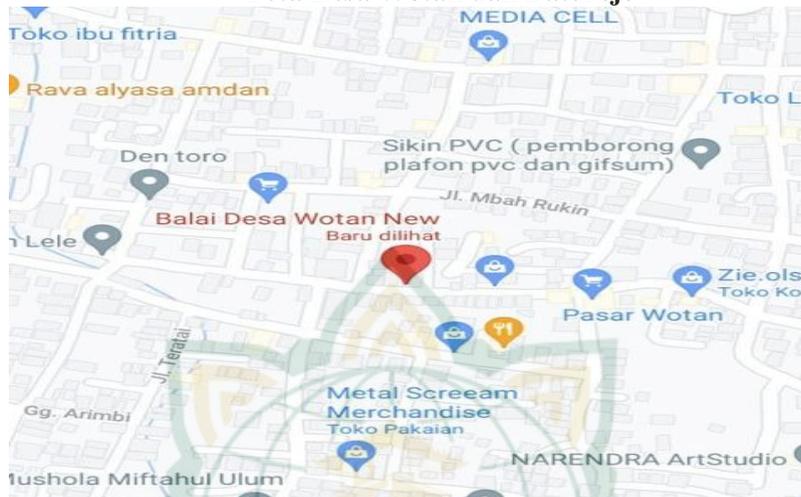
1. Kondisi Geografis Desa Wotan dan Baturejo

Secara geografis, Desa Wotan dan Desa Baturejo merupakan bagian dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Sukolilo.¹

- a. Sebelah timur, Desa Wotan berbatasan dengan Desa Baturejo
- b. Sebelah selatan, Desa Wotan dibatasi wilayah Desa Kedung Winong
- c. Sebelah utara, Desa Baturejo berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kudus
- d. Sebelah selatan, Desa Baturejo berbatasan dengan Desa Sukolilo

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Sukolilo dalam Angka 2021, "Kondisi Geografis Kecamatan Sukolilo", diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 06.30 WIB.

Gambar 4.1
Peta Desa Wotan dan Baturejo



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukolilo

Secara astronomi Desa Wotan memiliki luas wilayah mencapai 2113 Ha dan sebanyak 1756 Ha merupakan lahan sawah. Sedangkan luas keseluruhan Desa Baturejo adalah 946,50 Ha dan sebanyak 87,5% untuk sawah.

2. Pemerintahan

Secara administratif Desa Wotan terdiri dari 46 RT, 11 RW, dan 10 pedukuhan. Pada tahun 2021 jumlah penduduknya

mencapai 200000 jiwa dengan sebaran kepadatan penduduk 1500 kk. Sedangkan Desa Baturejo terdapat 4 RW, 23 RT dan 4 pedukuhan. Pada tahun 2021 jumlah penduduknya mencapai 6.157 jiwa. Jarak Baturejo dengan Kecamatan Sukolilo sekitar 2,1 km.

Desa Wotan dan Desa Baturejo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukolilo yang terletak dibawah pegunungan kendeng. Kecamatan Sukolilo berdiri Puskesmas milik pemerintah yang jarak tempuhnya 7 menit dekat dengan Desa Wotan dan Desa Baturejo.

3. Sosial-Politik Desa Wotan dan Baturejo

Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Wotan dilihat dari pendidikan yang ditamatkan terlihat presentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 26%, diikuti tamat SMP sebesar 24%, dan tamat SMA/SMK sebesar 18%. Sedangkan presentase penduduk yang tamat PT sebesar 6%. Disamping itu masih terdapat sebesar 6% penduduk 15 tahun ke atas yang belum pernah mengenyam pendidikan dan sebesar 20% pernah bersekolah di SD/MI namun tidak tamat. Sedangkan Desa Baturejo 1,5% nya lulus perguruan tinggi, 8% lulus SMA, tingkat tamatan SD 39% dan sebanyak 18% tidak bersekolah.

Peningkatan kesehatan di Kecamatan Sukolilo dapat di lihat dari adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jumlah tenaga kebidanan dari Desa Wotan dan Baturejo mencapai 10 tenaga kesehatan bidan. Agama tempat peribadatan yang tersedia di Desa Wotan pada tahun 2021 adalah 1 masjid, memiliki 12 mushola yang terbesar di seluruh wilayah Desa Wotan. Agama Islam adalah agama yang di anut mayoritas penduduk Desa Wotan dengan presentase sebesar 99,8%. Sedangkan Desa Baturejo terdapat 1 masjid, memiliki 5 mushola. Agama Islam pada Desa Baturejo mencapai 70% dan 30% merupakan pengikut ajaran surosentiko.

4. Profil singkat Desa Wotan dan Desa Baturejo

a. Desa Wotan

Desa Wotan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Desa Wotan terdiri dari 46 RT, 11 RW, dan 10 pedukuhan. Daerah desa tersebut berbatasan langsung dengan Desa Kedung Winong di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Baleadi dan Kabupaten Kudus di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Kudus di sebelah utara, dan disebelah timur berbatasan dengan Desa

Baturejo. Desa Wotan memiliki luas wilayah mencapai 2113 Ha, dan sebanyak 1756 Ha merupakan lahan sawah. Tidak heran jika Desa Wotan disebut-sebut sebagai desa dengan lahan pertanian terluas se-Jawa Tengah bahkan se-Indonesia.²

Sistem perkampungan di Desa Wotan cenderung terpecah dan memisah satu sama lainnya. Pola pemukiman Desa Wotan hampir sama dengan Desa Baturejo yang cenderung menyebar yang terdiri dari dusun-dusun dan bangunan rumah yang tersebar dengan jarak tidak tertentu. Dalam keagamaan, semua masyarakat Desa Wotan beragama Islam. Secara umum di Desa Wotan tidak terlihat adanya stratifikasi sosial. Masyarakat menganggap semuanya sama, akan tetapi yang membedakan hanya usia. Pandangan politik masyarakat Desa Wotan sangat terbuka, semua masyarakatnya sangat antusias dalam pergolakan politik. Termasuk anak muda, seperti halnya dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Desa Wotan yang melibatkan anak muda sebagai Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak (KPPS), maupun sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

b. Desa Baturejo (Sedulur Sikep)

Desa Baturejo terletak di bagian tengah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Desa ini berletakkan di perbukitan kapur yang disebut Gunung Kendeng. Desa baturejo memiliki luas wilayah 946,50 Ha dengan tingkat kemiringan 8% dan berada pada 120-150 meter diatas permukaan laut. Potensi di desa ini sebagian besar adalah lahan pertanian. Desa baturejo sendiri terbagi menjadi 4 dukuh dengan klasifikasi 4 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT).

Di desa Baturejo terdapat komunitas Sedulur sikep yang berjumlah cukup besar. Sedulur sikep ini berada di Dukuh Bombong, Desa Baturejo. Dalam keagamaan, masyarakat suku Samin di Desa Baturejo menganut aliran kepercayaan yang mereka sebut dengan ‘Sedulur Sikep,’ sedangkan agama mereka tetap Islam, meskipun mereka tidak menjalani sholat dan puasa, sedulur sikep mempunyai ajaran pokok samin sendiri. Masyarakat sedulur sikep ini

²Gambaran Umum Desa Wotan, diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 08.30 WIB.

memiliki aturan sendiri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sedulur sikep terkenal dengan mereka yang tidak patuh terhadap aturan pemerintah, akan tetapi sedulur sikep Desa Baturejo ini tetap memberikan hak suaranya dalam pemilu. Mereka juga sangat menjunjung tinggi bahwa tindakan *money politik* itu dilarang keras dalam proses pemilihan pemerintah. Pandangan politik masyarakat suku samin di dukuh Bombong Desa Baturejo ini sedikit mulai terbuka, masyarakat suku samin ini juga telah mengikuti pesta demokrasi, seperti keikutsertaannya dalam pemilihan umum serentak 2019.³

B. Hasil Temuan

1. Data Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Masyarakat Islam Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo

- a. Pemaparan terkait pelaksanaan pemilu serentak 2019 Di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati. Pemilu serentak 2019 dilaksanakan sesuai dengan proses penyusunan regulasi tentang pemilu, sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Agar terciptanya pemilu serentak 2019 yang sukses. Hal tersebut didapat dari hasil wawancara oleh pengawas kecamatan (Panwascam) Sukolilo dan panitia pemungutan suara (PPS) Baturejo, bahwa pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019, Panwas Kecamatan harus menjaga profesionalitas, integritas, independensi, dan netralisasi, serta tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, bahwa pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan dengan bersih bebas dari korupsi. Selain itu Panwas juga harus lebih reaktif dalam menemukan sebuah temuan yang di duga pelanggaran.⁴

³Gambaran Umum dan Desa Baturejo, diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 08.30 WIB.

⁴Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo , pada 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

Pemilu serentak 2019 kemarin sudah dilaksanakan sesuai prosedur regulasi tentang pemilu, mulai dari proses sebelum tahapan, kemudian urutan tahapan, sampai dengan pada tahap evaluasi. Artinya setiap proses urutan sebelum tahapan misalkan contohnya pendistribusian logistik seperti kotak suara, kertas suara sudah memenuhi standar. Kemudian dalam proses tahapan pemilu serentak 2019 mulai dari proses pembukaan tempat pemungutan suara (Tps) dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, di saksikan langsung oleh para saksi setiap partai, bahkan saksi calekpun ada. Proses pemilihan sampai dengan rekapitulasi dan pemuthakiran data juga sudah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

- b. Peneliti juga menggali informasi mengenai proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019 apakah memicu terjadinya konflik antar masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo dan masyarakat Desa Wotan, yaitu :

Sebelum pemilu serentak 2019 dilaksanakan sampai dengan setelah selesainya proses pemilu serentak, tidak ada suatu konflik antar masyarakat yang muncul di Sedulur Sikep Desa Baturejo. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan masyarakat sedulur sikep Ibu Hartatik. Bahwa dalam penjelasannya memberikan pemahaman sedulur sikep semakin sadar dan semakin menyadari, bahwa yang terpilih dari koalisi manapun yang menang itu adalah pilihan terbaik dari Sedulur Sikep. Harus saling toleransi, jadi tidak perlu adanya suatu konflik, (*gawe yo kudu ngopeni*).⁵ Artinya sebagai masyarakat demokrasi yang memegang penuh kekuasaan dalam pemerintahan harus mempunyai hak untuk mengatur atau menjaga proses pemilihan pemerintahan. Dengan demikian pemilu serentak 2019 di Desa Baturejo tidak ditemukannya suatu konflik.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Desa Wotan, bahwa dalam pelaksanaan pemilu serentak tidak ditemui adanya konflik masyarakat. Mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan hasil perhitungan suara semua diterima oleh masyarakat, baik dari kubu pemenang maupun kubu yang kalah. Masyarakat desa wotan

⁵Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Desa Baturejo, pada 6 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

diberikan penjelasan yang rasional dan transparan sehingga berkurangnya kesenjangan persepsi atas ketidakadilan. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Nina Aprilia salah satu masyarakat Desa Wotan, yang mana pendapatnya ini memberikan pemahaman bahwa tidak ditemuinya suatu konflik dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Desa Wotan. Masyarakat Wotan menerima suatu bentuk sosialisasi dan diberikan pemahaman bahwa baik kubu 01 dan kubu 02 seluruhnya merupakan rakyat Indonesia, itu pilihan terbaik dari masyarakat kita sendiri.⁶

- c. Peneliti juga menggali informasi tentang program sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemilu serentak 2019, yaitu :

Dari pihak Pengawas Kecamatan ada program sosialisasi pemilihan, termasuk sosialisasi bagi pemilih disabilitas. Sebelumnya ada tahapan-tahapan yang meliputi tahapan pengawasan partisipatif, artinya mengundang dari salah satu tokoh karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengadakan pengawasan dari luar pengawasan Panwascam sendiri. Termasuk yang diutamakan memang bagi pemilih disabilitas, dari tempat pembangunan tempat pemungutan suara (TPS), ada ruang untuk memudahkan bagi kaum disabilitas. Akses disabilitas juga dipantau, karena ada yang disabilitas tidak bisa jalan kaki, artinya membutuhkan dedukasi dan sosialisasi dan itu diprioritaskan paling utama. Untuk sosialisasi dari partai politik sendiri berupa pelaksanaan kampanye. Hal ini didapat dari hasil wawancara oleh Panwascam.

Dengan demikian penjelasan dari Panwascam memberikan pemahaman bahwa terkait sosialisasi yang menyangkut semua itu Panwascam, terkait dengan partai politik berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, jadi untuk partai politik pendidikan politik tidak ada, akan tetapi dari luar pengawasan Panwascam terdapat agenda sosialisasi tersendiri.⁷

Sesuai dengan wawancara dari Panwascam, diketahui bahwa di Desa Baturejo terdapat pelaksanaan

⁶Hasil Wawancara dengan Nina Aprilia masyarakat Islam Desa Wotan, pada 6 Juli 2021, pukul 12.00 WIB

⁷Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

sosialisasi yang dilakukan disalah satu rumah tokoh sedulur sikep. Sosialisasi ini dilakukan lewat perkumpulan yang mana sedulur sikep diberi arahan tentang pemilihan seperti money politik, tatacara pemilihan di Tps dan lain sebagainya. hal ini didapat dari hasil penjelasan dari Hartatik.

Dengan demikian, pendapat Hartatik ini memberikan pemahaman bahwa ada sosialisasi khusus untuk Sedulur Sikep, yaitu dilaksanakan dirumah salah satu tokoh warga sikep itu sendiri, yang bernama namanya De Cuk.⁸ Hal ini berbeda dengan masyarakat Desa Wotan, bahwa pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan oleh pihak-pihak pengawas di waktu pelaksanaan pemilu sudah berlangsung. Artinya pihak pengawas langsung memberikan prosedur tentang tatacara pemilihan di tps tersebut.⁹

- d. Selain pihak penyelenggara, Organisasi masyarakat seperti NU juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu : Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) ikut berpartisipasi dalam proses sosialisasi dalam pemilu serentak 2019. Selain para pihak penyelenggara, NU Sukolilo memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memilih pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini di dapat dari hasil penjelasan Darmaji sebagai anggota NU.

Pendapat Darmaji ini memberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin adalah wajib "*Nasbul Imamah*". Organisasi NU juga melakukan himbauan kepada masyarakat apabila mendengar berita yang belum tentu kejelasannya harus disaring dulu, kalau sudah tau itu berita tidak benar maka jangan sampe me ngeshare, sehingga tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat. Nu juga berpartisipasi dalam rangka memberi pemahaman tentang pelanggaran *money politic*, *Bahtsul Masa'il*, tidak boleh menerima politik uang, Nu melarang adanya *money politik*".¹⁰

⁸Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Desa Baturejo , Pada 6 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

⁹Hasil Wawancara dengan Nina Aprilia sebagai masyarakat Islam Desa Wotan, Pada 6 Juli 2021, Pukul 12.00 WIB

¹⁰Hasil Wawancara dengan Darmaji sebagai salah satu Anggota NU Sukolilo, pada 5 Juli, pukul 14.00 WIB.

Artinya bahwa pihak NU tidak melakukan sosialisasi secara langsung, akan tetapi ada pihak-pihak yang memberikan mobilisasi individu, memberikan pemahaman dan memotivasi masyarakat untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya. Memberikan pemahaman tentang berita hoax, bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak menyalahgunakan penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK).

2. Data Tentang Partisipasi Dan Problematika Pemilu Serentak Tahun 2019 Pada Masyarakat Islam Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo

Tabel 4.1
Data DPT dan Penggunaan Hak Pilih Pemilu Serentak 2019 Desa Wotan

No. Tps	Daftar Pemilih			Penggunaan Hak Pilih		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tps 1-5	436	461	897	351	385	736
Tps 6-10	550	563	1113	421	508	929
Tps 11-15	536	515	1051	359	443	802
Tps 16-20	516	500	1016	335	442	777
Tps 21-25	530	534	1064	408	448	856
Tps 26-30	534	504	1038	411	441	852

Sumber : KPU Kabupaten Pati

Berdasarkan dari tabel data DPT pemilu serentak 2019 Desa Wotan, terdapat 6.179 pemilih yang tersebar di 30 Tps Desa Wotan. Seperti yang dilihat dari data tersebut, jumlah daftar pemilih tetap lebih banyak dibandingkan dengan suara penggunaan hak pilih. Artinya disini dari jumlah daftar pemilih tetap, terdapat 80% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Tabel 4.2
Data DPT dan Penggunaan Hak Pilih Pemilu Serentak 2019 Sedulur Sikep Desa Baturejo

No. Tps	Daftar Pemilih			Penggunaan Hak Pilih		
	L	P	JML	L	P	JML
Tps 1-2	205	222	427	142	172	314
Tps 3-4	197	220	417	143	180	323
Tps 5-6	250	240	490	165	203	368
Tps 7-8	263	254	517	173	201	374

No. Tps	Daftar Pemilih			Penggunaan Hak Pilih		
	L	P	JML	L	P	JML
Tps 9-10	270	306	576	247	254	501
Tps 11-12	250	257	507	193	209	402
Tps 13-14	262	242	504	216	208	424
Tps 15-16	228	242	470	190	206	396
Tps 17-18	175	168	343	148	137	285
Tps 19-20	236	246	482	193	203	396
Tps 21-22	96	116	212	74	85	159

Sumber : KPU Kabupaten Pati

Berdasarkan dari tabel data DPT pemilu serentak 2019 Desa Baturejo, terdapat 4945 pemilih yang tersebar di 22 Tps Desa Baturejo. Seperti yang dilihat dari data tersebut, jumlah daftar pemilih tetap lebih banyak dibandingkan dengan suara penggunaan hak pilih. Artinya disini dari jumlah daftar pemilih tetap, terdapat 79% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

- a. Partisipasi dan penggunaan hak pilih masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo dalam keterlibatannya dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yaitu ada tiga meliputi, penyusunan kebijakan, kepanitiaan pelaksanaan dan penggunaan hak pilih.

- 1) Kepanitiaan pelaksanaan

Menjelang pemilihan umum serentak 2019 banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan cara mendaftarkan diri sebagai panitia pelaksanaan pemilu serentak. Dari pihak Pengawas Kecamatan merekrut masyarakat terutama yang direkrut untuk generasi mudanya, untuk menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), karena acuannya untuk regenerasi demokrasi indonesia. Dan yang ikut mendaftar untuk menjadi Ptps pun banyak sekali, semua rata-rata ada yang dari kalangan anak SMA , ada yang kuliah untuk direkrut menjadi Ptps. Karena

generasi muda tidak cukup hanya hadir memberikan hak suaranya saja, tetapi mereka juga harus ikut aktif melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pemilih pemuda memiliki peran besar sebagai pengawas partisipatif yang memastikan tidak ada suara yang dimanipulasi".¹¹

2) Penggunaan hak pilih

Pelaksanaan pemilu serentak 2019 mengalami peningkatan partisipasi pemilih. Hasil pemilu menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sekitar diatas 80%, lebih meningkat dibandingkan dengan pemilu bertahap kemarin. Peningkatan angka partisipasi pemilih ini mungkin disebabkan oleh gencarnya pemberitaan dari media sosial mengenai pemilu srentak 2019 yang baru kali pertama dilaksanakan di Indonesia, yang kedua pelaksanaan sosialisasi dari KPU yang maksimal dan kandidat calon yang menarik saat berkampanye.

- b. Peneliti juga menggali informasi tentang tingkat pemilih Golongan Putih (Golput) dan apatisme dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, sesuai dengan respon dari penyelenggara dan masyarakat Desa wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo :

Berdasarkan penjelasan dari Rofik Rumaji bahwa terdapat pemilih golput, tetapi catatan untuk pemilih golput sangat kecil sekali, sebabnya mungkin karena konstituen ada kekecewaan terhadap calon yg akan dipilih, (*halah nek bar yo lali*) artinya konstituen sudah pesimis terlebih dahulu untuk memilih. Yang kedua disebabkan karena mereka tidak peduli terhadap politik atau apatisme (*urip yo bakal ngene-ngene wae ora ono perubahan sopo wae pemerintahe*), artinya hidup akan begini-begini saja siapapun yang akan menjadi pemerintahnya.¹²

Dari hasil penelitian tersebut bahwa di Desa Wotan tingkat golongan putih sangat kecil, hal ini serupa dengan hasil penelitian dari Desa Baturejo, akan tetapi temuan hasil penelitian di Desa Baturejo penyebab adanya

¹¹Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo , pada 5 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

¹²Hasil Wawancara dengan Rofik Rumaji sebagai PPS Wotan, pada 7 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

golongan putih disebabkan oleh belum merasa bahwa mereka (masyarakat) sudah mempunyai tanggung jawab besar akan hak menyuarkan partisipasi pemilihan. Hal ini di dapat dari hasil wawancara oleh sedulur sikep Desa Baturejo.

Selanjutnya pihak PPS Ishak Hermanto memberikan pemahaman bahwa pemilih golput itu rata-rata mempunyai segala bentuk aktivitas, mungkin kalau pemuda aktivitas malamnya begadang sehingga keesokan harinya mereka malas, selain itu mereka merasa belum punya tanggung jawab besar sebagai pemuda untuk menyuarkan hak partisipasi pemilihan. Kalau untuk pemilih dewasa (orang tua) aktivitasnya kemarin musim panen, jadi sebagain ada yang ke sawah, tetapi angka golput kecil, lebih besar antusiasnya".¹³

- c. Sementara itu, peneliti juga menggali informasi terkait dengan perolehan suara dari Partai Politik Islam dan Partai Politik Nasionalis pada masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, yaitu :

Hasil suara pemilu serentak 2019 kemarin, yang mendominasi sebagai partai pemenang yaitu dari Partai Nasionalis. Karena mayoritas pemilih itu masih pemilih nasional, artinya pemilih nasional itu bersifat seperti ini, contohnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu yang dipandang bukan pada ke PDIPnya, melainkan ke figur soekarno atau megawati nya, sehingga istilahnya (*Dia itu kalau anak nya soekarno pasti sudah terjamin baik*). Sedangkan agama tidak seperti itu, alasannya karena ada tokoh atau figur yang sudah tersorot di partai tersebut. Selain itu sebab yang lain mungkin karena para pemimpin Islam tidak memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka. Partai Islam mencari manfaat politik yang bersifat jangka pendek. Secara statistik jumlah umat islam di sini itu besar, bahkan mayoritas, tetapi secara kualitatif kecil, baik dari segi kualitas akidahnya, ibadahnya, akhlaknya maupun dalam penguasaanya atas pengetahuan umum. Sebetulnya dari masyarakat sendiri tidak serta merta memandang dari partai mana asal calon tersebut, karena sekarang politik itu mana yang memberi

¹³.Hasil Wawancara dengan Ishak Hermanto sebagai PPS Baturejo, pada 7 Juli 2021, pukul 12.00 WIB.

nominal uang yang besar nah itu yang akan dipilih, yang akan jadi pemenangnya. Sedangkan menurut Organisasi masyarakat (NU), masyarakat memilih pemimpin itu sesuai mana yang mampu menyampaikan aspirasinya, dan itu yang mereka pilih. Akan tetapi semuanya ini kembali ke hati nuraninya masing-masing, kembali ke kultur jawa masing-masing, kadang masih kebawa budaya kejawaen.¹⁴

Di Desa Wotan sendiri terdapat temuan bahwa partai pemenang yaitu dari partai nasionalis (PDIP), hampir di tiap Tps dominasi partai pemenang adalah PDIP. Alasan kemenangan dari partai tersebut menurut masyarakat karena partai PDIP mulanya sudah mempunyai nama, artinya sudah tersohor dan partai tersebut di usung dari Soekarno.

Hal ini sesuai dengan wawancara dari masyarakat Desa Wotan Nina Aprilia, bahwa penjelasannya memberikan pemahaman bahwa ia pribadi memilih PDIP, karena partai tersebut figur-figurnya familiar di masyarakat, dan tokohnya sudah terjamin. Misalkan Soekarno dan Megawati yang menjadi tokoh sorotan masyarakat dulu. Sedangkan partai yang lain menurutnya figur-figurnya kurang tersohor dan kurang menjamin. Mungkin alasan sementara itu, dengan demikian perolehan PDIP lebih banyak dibandingkan partai yang lain".¹⁵

Hal tersebut sama dengan hasil penelitian di Desa Baturejo, bahwa sedulur sikep basisnya memang pada partai PDIP. Sedulur Sikep percaya bahwa tokoh Megawati putri Soekarno itu sebagai Ibu bumi yang mau membela petani Sedulur Sikep. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh masyarakat Sikep, bahwa penjelasannya memberikan pemahaman bahwa semua partai tujuannya baik, jadi ia memilih sesuai hati nuraninya sendiri. Sedulur Sikep dikatakan punya agama atau tidak itu dianggap sebagai angin lalu, akan tetapi Sedulur Sikep itu tau mana yang baik dan mana yang tidak. Waktu pemilihan kemarinpun ia secara terang-terangan memilih PDIP, karena Sedulur Sikep basisnya pada partai tersebut. Sedulur

¹⁴Hasil Wawancara dengan Darmaji sebagai Anggota NU Sukolilo, pada 5 Juli, pukul 14.00 WIB

¹⁵Hasil Wawancara dengan Nina Aprilia sebagai masyarakat Islam Wotan, Pada 6 Juli 2021, Pukul 12.00 WIB.

Sikep percaya bahwa tokoh Megawati putri Soekarno itu sebagai Ibu bumi yang mau membela petani Sedulur Sikep".¹⁶

- d. Pemaparan terkait tentang problematika yang didapat pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo. Mulai dari persiapan sampai proses pelaksanaan pemilihan umum serentak.

1) Proses persiapan pemilihan

Tantangan terkait pemilihan umum serentak 2019 yang paling berat pada saat verifikasi terkait kewilayahan. Karena wilayah Kecamatan Sukolilo itu berada diantara pegunungan yang agak dalam. Artinya sebagian desa yang terletak di sukolilo itu lokasinya diantara tebing pegunungan, sehingga hal tersebut akan mengganggu para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu merasakan beratnya medan diwilayah Kecamatan Sukolilo.¹⁷

Di desa wotan, masyarakat masih banyak yang mengalami kebingungan dalam proses pemilihan, terutama bagi lanjut usia yang penglihatannya tidak begitu jelas, apalagi di surat suara terdapat banyak sekali gambar pilihan. Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Wotan juga kurang ramah untuk penyandang disabilitas, karena tps terletak di lahan kosong, bukan ditempatkan di gedung. Jalan menuju tps juga kurang bagus, bahkan masih banyak batunya, sehingga akan membahayakan masyarakat yang sudah lanjut usia.

Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara oleh masyarakat wotan. Bahwa ia tidak mengalami kesulitan dalam proses pemilihan, tetapi mereka berpendapat bahwa untuk pemilih dewasa (orang tua) mungkin akan mengalami kebingungan karena di situ banyak sekali pilihan gambar partai, jadi untuk orang yang kurang paham pasti mengalami kebingungan,

¹⁶Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Baturejo, Pada 6 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada 5 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

tetapi saya sebagai anak muda bisa memahami kalau ini deretan Dprd, Presiden dan lain sebagainya.¹⁸

Hal ini serupa dengan temuan hasil penelitian di desa baturejo, bahwa banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pemilihan. Mungkin untuk pemilih muda atau pemilih yang notabene sudah paham mengenai partai akan mudah dalam proses pemilihan. Akan tetapi untuk pemilih yang kurang paham dan butuh dampikan karena mungkin ada yang penglihatan tidak begitu jelas dan kurang paham tentang partai akan mengalami kesulitan.

Hal ini didapatkan dari hasil wawancara oleh masyarakat desa baturejo, bahwa dari hasil penjelasannya memberikan pemahaman kalau banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pemilihan, karena pilihanya banyak sekali, selain itu tidak begitu jelas melihat bentuk penulisan yang sangat kecil, ia sempat tanya kepada anaknya, akan tetapi petugas Kpps melarang.¹⁹

2) Problematika juga muncul pada penanganan logistik pemilu serentak 2019, yaitu :

Terdapat permasalahan di Kecamatan Sukolilo, di Kabupaten Pati untuk legislatif dapil 5 itu terdiri dari Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus dan Tambakromo. Pada saat itu ada kesalahan pengirimansurat suara, yang dapil 3 dikirim ke dapil 5, bahkan surat suara tersebut sudah selesai dicoblos. Akhirnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak berani menengahi, dan diambil alih oleh Panwascam.

Hal ini berdasarkan penjelasan dari Panwascam, bahwa terkait permasalahan seperti ini, Panwacamu acuannya pada peraturan Kpu maupun Perbawaslu, bahwa surat suara yang sudah berhasil dicoblos hitungannya harus masuk ke partai, bukan masuk ke calonnya.²⁰

¹⁸Hasil Wawancara dengan Nina Aprilia sebagai masyarakat Islam Wotan, Pada 6 Juli 2021, Pukul 12.00 WIB.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Baturejo, Pada 6 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

²⁰Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

3) Rekapitulasi Perhitungan Suara, Pengisian formulir C1.

Dalam penulisan C1 membutuhkan waktu berjam-jam. Sedangkan penulisan dan tandatangan harus ditulis tangan secara manual. Bagian atas form C1 harus diisi dengan daerah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kondisi capek, banyak penulisan yang salah. Setelah pengisian form C1 selesai lanjut menyortir formulir tersebut ke amplop. Amplop tersebut berisi berita acara, C1 hologram, amplop C1 tidak hologram, amplop C1 Kecamatan, dan amplop C1 Kelurahan serta amplop KPUD. Semuanya itu butuh waktu kurang lebih satu jam. Hal tersebut sangat dialami oleh para KKPS, bahkan banyak sekali yang mengalami kebingungan.²¹

4) Beban kerja para penyelenggara pemilu serentak 2019

Problematika yang muncul tersebut akan menambah beban kerja para penyelenggara pemilu serentak 2019 yaitu di tingkat KPPS, PPK dan PPS. Beban kerja yang sangat berat itu disebabkan oleh format lima jenis surat suara yang dilaksanakan dalam waktu secara bersamaan. Tugas KPPS dan PTPS tidak hanya dilaksanakan pada hari H pemungutan suara, akan tetapi sudah mulai bertugas H-3 sebelum pelaksanaan pemilu serentak. Tugas tersebut mulai dari pembersihan baliho, proses penerimaan dan pengamanan logistik pemilu, dan membangun lokasi TPS, dilanjutkan hari berikutnya untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara untuk lima jenis surat suara secara bersamaan²².

Hal ini sesuai dengan hasil temuan penelitian kepada masyarakat Wotan dan Sedulur Sikep Baturejo, bahwa banyak dari petugas penyelenggara pemilu merasakan pegal sampai ada yang sampai sakit juga setelah pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Karena

²¹Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

²²Hasil Wawancara dengan Rofik Rumaji sebagai Pps Wotan, pada tanggal 7 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

mulai dari pagi sudah harus bertugas sampai dengan larut malam baru selesai.²³

Terkait pelaksanaan pemilu serentak kemaren itu lancar, tetapi ada banyak kendala yang dihadapi, termasuk kendala Kpps yang kelelahan sampai malam. Perlu pembenahan untuk efisiensi waktu pemilu serentak, tetapi untuk petugasnya mungkin harus lebih banyak lagi. Misalnya untuk pemilihan presiden diadakan Tps sendiri, terus juga untuk Dprd, apalagi ada wacana dijadikan satu dengan pemilihan bupati, kalau bisa ada Tps nya sendiri atau ada petugasnya sendiri, sehingga petugas tidak begitu kelelahan.²⁴

- 5) Peneliti juga menggali informasi mengenai money politic dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, yaitu :

Di desa wotan money politik sudah sangat mengakar dimasyarakat, money politik itu sudah membudidaya di indonesia, kalau tidak ada money politik pemilihan akan semakin berkurang. Money politik itu suatu suara dari masyarakat yang dibayar dengan uang, mereka tidak memilih dengan hati nuraninya, tapi karena uang. Hampir seluruh masyarakat wotan diberikan bentuk money politik dari simpatisan. Money politik sudah menjadi budaya masyarakat Wotan, dan itu akan susah sekali jika dihilangkan, padahal pada saat sosialisasi dan kampanye pihak-pihak terkait seperti Dprd mengencar-gencarkan untuk menghindari adanya money politik, tetapi dibelakang itu mereka tetap melakukan pemberian berupa iming-iming uang. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara oleh masyarakat Wotan.

"Saya pribadi mendapatkan pemberian dari simpatisan berupa uang, pemberian tersebut diberikan sekitar H-1 sebelum pelaksanaan pemilu serentak, tetapi tetangga saya juga ada yang diberikan H-2 sebelum pelaksanaan. Saya pribadi mengenai money

²³Hasil Wawancara dengan Lita Ratnasari sebagai Ptps Wotan, pada tanggal 7 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.

²⁴Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Seduler Sikep Baturejo, pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

politik kurang setuju, karena kalau tidak ada uang masyarakat tidak akan memberikan suaranya (golput), dan masyarakat akan memilih mana calon yang memberikan lebih banyak uang nya ".

Hal ini juga dialami oleh Sedulur Sikep Desa Baturejo. Sebelum pemberian money politik dilaksanakan, sebelumnya sudah ada sosialisasi tentang pemilihan. Dijelaskan tentang tatacara pemilihan dan diberi pemahaman terkait dengan money politik. Akan tetapi para penyelenggara masih banyak yang melakukan money politik tersebut. Artinya di sini penyelenggara secara tidak langsung memberikan aturan, tetapi aturan tersebut dilanggar sendiri. Sedulur sikep sudah mempunyai aturan dalam hidupnya. Mereka bisa membedakan mana atueran yang baik dan yang buruk. Sedulur sikep akan menolak keras suatu kegiatan pelanggaran, termasuk pelanggaran tentang money politik. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara oleh Sedulur Sikep Desa Baturejo.

"Saya pernah ikut dalam sosialisasi pemilihan, dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang money politik, bahwa seseorang yang melakukan money politik itu dikatakan sebagai pelanggaran. Akan tetapi pihak-pihak terkait yang ikut dalam pelaksanaan politik tetap melaksanakan adanya money politik, tembungnya pemberian uang itu termasuk dalam sambatan. Akan tetapi keluarga saya tidak setuju dengan tembungan tersebut, semua keluarga saya sudah wanti-wanti bahwa tidak boleh menerima suatu bentuk pemberian apapun termasuk pemberian uang. Saya memilih sesuai dengan hati nurani saya sendiri, yang menurut saya calon tersebut baik untuk kedepannya. Dalam hati saya, Aturan yang buat pemerintah tetapi dilanggar sendiri, *Lakon koyo ngono kok dilakoni terus* (Pelanggaran seperti itu kok dilanggar terus)ngeluh dengan dirinya sendiri ".

Tabel 4.3
Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
Pada Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Wotan
Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo)

Desa Wotan		Sedulur Sikep (Desa Baturejo)	
(Pelaksanaan)	(Partisipasi & problematika)	(Pelaksanaan)	(Partisipasi & problematika)
Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang pemilu sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2008	Partisipasi masyarakat, meliputi : 1) Keterlibatan dalam kepanitiaan pelaksanaan. 2) Penggunaan hak pilih masyarakat yang meningkat	Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang pemilu sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2008	Partisipasi masyarakat, meliputi : 1) Keterlibatan dalam kepanitiaan pelaksanaan. 2) Penggunaan hak pilih masyarakat yang meningkat
Dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak Di Desa Wotan tidak ditemukannya suatu konflik	Angka golongan putih sangat kecil. Golongan putih disebabkan karena masyarakat belum merasa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memilih	Dalam pelaksanaan tidak ditemukan suatu konflik dalam proses hasil pemungutan suara	Angka golongan putih sangat kecil. Golongan putih disebabkan karena masyarakat mempunyai kekecewaan terhadap kandidat
Sosialisasi terkait pemilihan umum serentak tidak dilaksanakan secara langsung, akan tetapi sosialisasi hanya	Dominasi partai pemenang yaitu PDIP. Sebab, masyarakat percaya bahwa partai PDIP sudah terjamin karena pengusung partai tersebut adalah Soekarno	Sosialisasi terkait pemilihan umum serentak dilaksanakan disalah satu rumah sedulur sikep, yaitu dirumah tokoh sedulur sikep	Dominasi partai pemenang yaitu PDIP. Sebab, masyarakat percaya bahwa pengusung partai PDIP yaitu Megawati Sokarno Putri adalah

Desa Wotan		Sedulur Sikep (Desa Baturejo)	
(Pelaksanaan)	(Partisipasi & problematika)	(Pelaksanaan)	(Partisipasi & problematika)
dilakukan pada saat pemilu berlangsung		yang bernama De Cuk	seseorang yang membela petani kecil sedulur sikep
NU Sukolilo melakukan sosialisasi bahwa masyarakat mempunyai hak besar untuk memilih pemimpin, dan memberikan pemahaman terkait money politic.	Money politic masih mewarnai pelaksanaan pemilu. Banyak masyarakat yang masih menerima uang, bahkan sampai pada saat H-1 pelaksanakan pemilu.	NU Sukolilo melakukan sosialisasi bahwa masyarakat mempunyai hak besar untuk memilih pemimpin, dan memberikan pemahaman terkait money politic	Pihak-pihak calon kandidat masih melakukan pemberian politik uang, akan tetapi sedulur sikep tidak menerimanya. Sedulur sikep sangat melarang adanya praktik money politic pada saat pemilihan.

C. Pembahasan

1. Realitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Masyarakat Islam Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati

- a. Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dimulai dari aksi Effendi Ghazali dan koalisi masyarakat yang menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akhirnya mengeluarkan putusan uji materi (*judicial review*) untuk UU yang digugat oleh Effendi Ghazali pada Mei 2013 dan resmi disidangkan pada Januari 2014, akan tetapi penerapan pemilu serentak ini bisa dilakukan pada tahun 2019. Pemilu serentak 2019 menjadi pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, pada pemilu serentak ini ada 5 pemilihan, yaitu diantaranya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 harus

didasarkan pada asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilu serentak seperti KPU dan Bawaslu harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel dan efisien. Warga Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih harus terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara bersamaan ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang kongruen, yaitu terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan akan stabil dan efisien.²⁵

Pemilihan umum serentak di Sukolilo, lebih tepatnya di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. Pelaksanaan pemilu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur regulasi tentang pemilu sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. mulai dari proses sebelum tahapan, urutan tahapan, sampai dengan pada tahap evaluasi sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019, Panwas Kecamatan harus menjaga profesionalitas, integritas, independensi, dan netral, serta tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu Panwas juga harus lebih reaktif dalam menemukan sebuah temuan yang di duga pelanggaran. Untuk proses sebelum tahapan pemilu mencakup sebagai berikut :

- 1) Penentuan daftar pemilih yang berhak memilih
- 2) Pendaftaran dan penentuan peserta pemilu
- 3) Alokasi kursi dan penentuan daerah pemilihan
- 4) Seleksi dan penetapan calon
- 5) Pelaksanaan kampanye

²⁵Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019". H. 45.

6) Pemungutan dan rekapitulasi suara

Dalam pengelolaan logistik seperti prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu misalnya kotak suara, kertas suara sudah datang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis spesifikasinya. Karena dari ketentuan KPU menyebutkan bahwa logistik penghitungan suara harus berada di TPS satu hari sebelum pencoblosan berlangsung. Kemudian dalam proses tahapan pemilu serentak di Kecamatan Sukolilo mulai dari proses pembukaan tempat pemungutan suara (Tps) sudah dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, di saksikan langsung oleh para saksi setiap partai, bahkan saksi calekpun ada.

Hal ini didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan Panwascam Sukolilo, bahwa pelaksanaan Pemilu serentak 2019 kemarin sudah dilaksanakan sesuai prosedur regulasi tentang pemilu, mulai dari proses sebelum tahapan, kemudian urutan tahapan, sampai dengan pada tahap evaluasi. Artinya setiap proses urutan sebelum tahapan misalkan contohnya pendistribusikan logistik seperti kotak suara, kertas suara sudah memenuhi standar. Kemudian dalam proses tahapan pemilu serentak 2019 mulai dari proses pembukaan tempat pemungutan suara sampai dengan pemutakhiran data dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.²⁶

- b. Berdasarkan hasil wawancara dari Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) Desa Wotan dan Desa Baturejo, bahwa Penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan tidak menimbulkan adanya konflik antar masyarakat, karena pada pemilu sebelumnya sering timbul konflik antar masyarakat dari koalisi pemenang dan koalisi yang kalah. Karena sebelum menjelang pemilu serentak, jajaran para penyelenggara sudah memberikan penjelasan yang rasional dan transparan sehingga berkurangnya kesenjangan persepsi atas ketidakadilan.²⁷ Sebelum pelaksanaan pemilu serentak sampai dengan setelah selesainya proses pemilu serentak, tidak ada konflik yang muncul di Sedulur Sikep. Karena Sedulur Sikep

²⁶Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

²⁷Hasil Wawancara dengan PPS Wotan dan Baturejo.

mendapatkan pemahaman kepada penyelenggara bahwa baik koalisi satu dengan koalisi yang lainnya itu merupakan sama-sama rakyat Indonesia, yang dipilih merupakan pilihan terbaik dari rakyat. Jadi artinya Sedulur Sikep menerima hasil dari pilihan masyarakat.

Hal ini di dapatkan dari hasil wawancara oleh Masyarakat Sedulur Sikep Baturejo, bahwa dalam proses pemutakhiran data hasil suara tidak ada konflik antar masyarakat yang muncul di Sedulur Sikep Desa Baturejo. Sedulur Sikep semakin paham dan semakin menyadari, mau dari koalisi manapun yang menang itu adalah pilihan terbaik dari Sedulur Sikep, harus saling toleransi saja, jadi tidak perlu adanya suatu konflik, (*gawe yo kudu ngopeni*).²⁸ Artinya sebagai masyarakat demokrasi yang memegang penuh kekuasaan dalam pemerintahan harus mempunyai hak untuk mengatur atau menjaga proses pemilihan pemerintahan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 baik di masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo tidak ada suatu konflik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan hasil pemutakhiran data terpilih.

- c. Sebelum menjelang pemilu serentak, para penyelenggara mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan paham tentang pemilu serta hal terkait pemilihan. Kegiatan sosialisasi diadakan rutin sebelum berlangsungnya pemilihan umum serentak. kegiatan sosialisasi ini di laksanakan atas kerjasama dari KPU dengan organisasi masyarakat yang nota benanya memiliki basis masa atau lembaga swadaya masyarakat. Dari Panwascam Sukolilo ada program sosialisasi pemilihan, termasuk bagi pemilih disabilitas. Sosialisasi ini menjelaskan tentang proses dan tata cara pemilihan, money politik dan pendidikan politik. Dari partai politik juga terdapat program sosialisasi untuk masyarakat, yaitu dalam penyelenggaraan kampanye. Di mulai dari tahapan partisipatif, yang mana Panwascam mengundang

²⁸ Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Baturejo, pada 6 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

tokoh masyarakat desa yang memiliki basis masa seperti organisasi Nahdlatul Ulama (NU), karang taruna dan tokoh agama, untuk mengadakan pengawasan dari luar pengawasan Panwascam sendiri, agar memudahkan program sosialisasi. Khususnya Panwascam mengutamakan penyandang disabilitas yang membutuhkan dedukasidan sosialisasi, mulai dari pembangunan Tps dan aksesibilitas ke Tps harus ramah.²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dari Masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep desa Baturejo, bahwa memang ada program sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu serentak untuk masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan lewat perkumpulan Desa, yang mana masyarakat diberikan sosialisasi dan dedukasi terkait tugas mereka wajib sebagai masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi memberikan hak suaranya kepada pemilihan umum serentak 2019 mendatang. Penyelenggara pemilu tingkat Desa memberikan sosialisasi terkait tatacara pemilihan dan pemahaman tentang money politik. Untuk Sedulur Sikep sendiri yang jumlah populasinya lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat Islam Wotan, sosialisasi dilaksanakan di salah satu tokoh masyarakat yang dianggap sebagai panutan.

Hal ini didapatkan dari hasil wawancara kepada salah satu anggota Sedulur Sikep Desa Baturejo, bahwa terdapat pelaksanaan sosialisasi khusus untuk Sedulur Sikep yang dilaksanakan dirumah salah satu tokoh warga Sikep itu sendiri, yang bernama "De Cuk", lewat perkumpulan tersebut Sedulur Sikep diberi arahan pemilihan. Contohnya tentang *money politic*, tatacara pemilihan di Tps dan lain sebagainya.³⁰

- d. Organisasi masyarakat (Ormas) NU Sukolilo juga melaksanakan sosialisasi pemilihan untuk masyarakat. Sebab peran Ormas sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilihan. Para anggota NU yang memiliki pondok pesantren (Ponpes) dan biasanya mereka juga memiliki lembaga dibidang pendidikan ini sangat akan mudah untuk mempengaruhi

²⁹hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

³⁰Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Baturejo, pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

masyarakat atau memobilisasi masyarakat agar ikut berpartisipasi pada pemilihan umum serentak 2019. Dalam sosialisasinya NU memberikan pemahaman bahwa sebagai negara demokrasi memilih pemimpin itu wajib. NU memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraniya, melaksanakan sosialisasi tentang pelanggaran money politik, dan memberikan sosialisasi terkait tentang berita hoax yang banyak beredar menjelang pelaksanaan pemilu serentak.

Hal ini didapatkan dari hasil wawancara kepada salah satu anggota NU Sukolilo, bahwa dari penjelasannya memberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin itu wajib, *Nasbul Imamah*. Maka dari itu NU tetap memotivasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memilih pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Organisasi NU juga melakukan himbuan kepada masyarakat apabila mendengar berita yang belum tentu kejelasannya harus disaring dulu, kalau sudah tahu itu berita tidak benar maka jangan sampe me ngeshare, sehingga tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat. NU juga berpartisipasi dalam rangka memberi pemahaman tentang pelanggaran money politik, *Bahtsul Masa'il*, tidak boleh menerima politik uang, Nu melarang adanya money politik.³¹

2. Partisipasi dan Problematika Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Masyarakat Islam Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Pati

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo mengalami peningkatan. Tingkat partisipasi dari masyarakat ini menjadi tolak ukur suatu desa dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dilihat dari penggunaan hak pilih mereka, namun bisa dilihat dari partisipasi mereka dalam pelaksanaan tahapan pemilu, yaitu menjadi penyelenggara tingkat Desa, serta keterlibatan dalam penyusunan kebijakan. Menurut Miriam Budiarto, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara

³¹Hasil Wawancara dengan Darmaji sebagai salah satu anggota NU Sukolilo

aktif dalam kehidupan politik, antara lain secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, teori pemikiran politik Al-Mawardi (Al-Ikhtiar) mempunyai konsep salah satunya tentang suksesi kepemimpinan yang melibatkan pemilih. Dalam konsep Al-Mawardi disebutkan bahwa ada 3 syarat sebagai seorang pemilih yaitu : a) Mempunyai kualitas dan sifat keadilan dalam memilih b) Berilmu, sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya c) Memiliki pendapat yang kuat, sehingga mereka mampu memilih mana pemimpin yang mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini sangat relevan dengan masyarakat Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, tidak hanya para pemilih akan tetapi pada penyelenggara juga sudah menerapkan syarat bahwa harus bersikap adil dan berilmu serta berani tegas menghadapi suatu masalah. Misalnya saja pada anggota KPU dan Panwascam yang sebelumnya sudah mempunyai ilmu tentang pemilu, sehingga akan mudah dalam mensukseskan pemilihan kepemimpinan.

Dari hasil penelitian penulis, diketahui ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo dalam keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, yaitu :

1) Keterlibatan dalam kepanitiaan pelaksanaan

Pihak Panwascam Sukolilo mengatakan bahwa mereka merekrut masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pemilu serentak jumlahnya cukup banyak, terutama yang di rekrut untuk generasi mudanya. Keterlibatan dalam tahapan masyarakat dalam pemilu serentak ini seperti perekrutan menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panwascam mengutamakan bagi generasi muda karena acuannya untuk regenerasi demokrasi Indonesia. Yang mendaftar untuk terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu rata-rata kalangan anak SMA dan kuliah. Karena pada dasarnya generasi muda tidak cukup hanya untuk hadir memberikan hak suaranya saja, tetapi mereka juga

harus ikut aktif melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Panwascam mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran besar sebagai pengawas partisipatif yang memastikan tidak ada suara masyarakat yang dimanipulasi.

2) Keterlibatan dalam penggunaan hak pilih

Berdasarkan dari data dan hasil wawancara oleh Panwascam Sukolilo, bahwa presentase partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 lebih besar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sekitar diatas 80%, lebih meningkat dibandingkan dengan pemilu bertahap kemarin. Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat bahwa masyarakat Islam Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo cukup sadar dengan pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka mengajak kerabat, teman dan keluarganya untuk mencoblos di TPS. Bahkan banyak masyarakat yang menyempatkan waktunya dalam bekerja untuk hadir menggunakan hak pilih mereka. Namun ada juga yang tidak menggunakan hak pilih mereka karena sedang bekerja diluar kota dan tidak mengurus sirat pindah TPS. Peningkatan angka partisipasi pemilih ini mungkin disebabkan oleh gencarnya pemberitaan dari media sosial mengenai pemilu serentak 2019 yang baru kali pertama dilaksanakan di Indonesia, dan pelaksanaan sosialisasi dari KPU yang maksimal dan kandidat calon yang menarik saat berkampanye.

- b. Peneliti juga menggali informasi tentang tingkat pemilih Golongan Putih (Golput) dan apatisisme dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, sesuai dengan respon dari penyelenggara pemilu serentak 2019 di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo. Dari hasil penelitian dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo bahwa angka pemilih golput dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 sangat kecil dan lebih banyak antusias dalam menggunakan suaranya³²

³²Hasil Wawancara dengan Rofik Rumaji sebagai PPS Wotan, pada tanggal 7 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Desa Wotan bahwa faktor penyebab masyarakat memilih golput yaitu : 1) Konstituen merasa kecewa terhadap calon yg akan dipilih, (*halah nek bar yo lali*) artinya konstituen sudah pesimis dulu sebelum memilih 2) Karena memang mereka tidak peduli terhadap politik atau apatisme (*wrip yo bakal ngene-ngene wae ora ono perubahan sopo wae pemerintahe*), artinya hidup akan begini saja siapapun pemerintahnya 3) Pemuda yang merasa belum punya tanggung jawab besar sebagai pemuda yang harus menyuarakan hak partisipasi pemilihan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dari Sedulur Sikep Desa Baturejo bahwa penyebab seseorang memilih golput itu karena pada saat pelaksanaan pemilu serentak dilakukan secara bersamaan dengan musim panen di Desa Baturejo, jadi sebagai sedulur sikep ada yang ke sawah, dan merasa tidak punya tanggung jawab yang besar terhadap hak pilih mereka.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dari masyarakat islam desa wotan dan sedulur sikep desa baturejo masih ada masyarakat yang memilih untuk golput, namun angka pemilih golput lebih sedikit dibandingkan dengan antusias masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya.

- c. Hasil rekapitulasi pemilu serentak 2019 di Masyarakat Islam Desa Wotan Dan Sedulur Sikep Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati menyebutkan bahwahasil suara pemilu serentak 2019 kemarin yang mendominasi itudari Partai Nasionalis, yaitu PDIP. Faktor dominasi kemenangan oleh partai tersebut adalah kuatnya kepemimpinan dari ketua umum PDIP yaitu megawati soekarno putri yang masih memegang peran kunci dalam mendongkrak suara PDIP di pemilu serentak 2019. Sedangkan angka perolehan suara dari partai Islam cenderung kecil, karena masyarakat Islam Desa Wotan sendiri sudah nasional dan belum fanatik dengan agama, mereka lebih memilih PDIP dibandingkan dengan partai yang lain. Karena masyarakat merasa bahwa partai PDIP itu merupakan partai yang sudah terjamin. Selain itu faktor kecilnya angka perolehan suara dari partai Islam disebabkan oleh 1) Calon kandidat pemimpin Islam tidak

memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka 2) Partai Islam mencari manfaat politik yang bersifat jangka pendek.

Hal tersebut di dapat dari hasil wawancara kepada Panwascam Sukolilo, bahwa mayoritas pemilih di Desa Wotan dan Baturejo masih pemilih nasional, artinya pemilih nasional itu bersifat seperti ini, contohnya partai PDIP yang dipandang bukan kepartai PDIPnya, melainkan ke figur soekarno atau megawati nya, sehingga istilahnya (*Dia itu kalau anak nya soekarno pasti sudah terjamin baik*). Selain itu sebab yang lain karena para pemimpin Islam tidak memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka. Partai Islam mencari manfaat politik yang bersifat jangka pendek. Secara statistik jumlah umat islam di sini itu besar, bahkan mayoritas, tetapi secara kualitatif kecil, baik dari segi kualitas akidahnya, ibadahnya, akhlaknya maupun dalam penguasaanya atas pengetahuan umum. Dengan demikian, perolehan Partai Islamis cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Partai Nasional".³³

Sedangkan di Sedulur Sikep Desa Baturejo kemenangan PDIP disebabkan karena basis dari Desa tersebut adalah PDIP. Sedulur Sikep percaya bahwa tokoh Megawati Soekarno Putri itu sebagai Ibu bumi yang mau membela petani Sedulur Sikep. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara oleh Sedulur Sikep Desa Baturejo, bahwa dalam penjelasannya memberikan pemahaman semua partai tujuannya baik, jadi harus memilih sesuai hati nurani sendiri. Sedulur sikep dikatakan mempunyai agama atau tidak itu dianggap angin lalu, Sedulur Sikep itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Waktu pemilihan kemarinpun banyak Sedulur Sikep yang secara terang-terangan memilih PDIP, karena Sedulur Sikep basisnya pada partai tersebut. Sedulur Sikep percaya bahwa tokoh Megawati putri Soekarno itu sebagai Ibu bumi yang mau membela petani Sedulur Sikep .³⁴

³³Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo , pada 5 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

³⁴hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Baturejo, pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

- d. Perubahan penyelenggaraan sistem pemilu bertahap ke pemilu serentak 2019 membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu yang luar biasa. Meskipun penyelenggaraan pemilu serentak dianggap bisa menjanjikan terciptanya pemilu yang stabil dan efisien, namun pada kenyataannya belum berjalan dengan sempurna. Pada pelaksanaannya, pemilu serentak di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo menimbulkan problematika dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu tersebut. Pada persiapan pelaksanaannya sendiri terdapat tantangan terkait verifikasi kewilayahan. Karena wilayah Kecamatan Sukolilo itu diantara pegunungan yang sebagian desa terdapat diantara tebing gunung, jadi masalah ini dialami oleh para penyelenggara pemilu serentak seperti KPU dan Bawaslu yang merasakan beratnya medan di wilayah Kecamatan Sukolilo.³⁵

Berikut problematika pada pelaksanaan pemilu serentak 2019, antara lain :

1) Proses pemilihan

Dalam proses pemilihan pemilu serentak, masyarakat Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo banyak yang mengalami kesulitan dan kebingungan dalam memilih, karena terdapat lima surat suara yang harus dipilih secara bersamaan. Tentunya bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia, mengalami kesulitan pada saat pencoblosan karena desain surat suara yang cukup besar dan proses pelipatan surat suara menjadi lebih sulit, sehingga hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama.

Hal tersebut di dapatkan dari hasil wawancara oleh salah satu masyarakat Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo, bahwa penjelasaannya memberikan pemahaman banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pemilihan, karena mengingat begitu banyaknya pilihan, selain itu masyarakat tidak begitu jelas melihat bentuk penulisan yang sangat kecil. Selain itu dalam proses pemilihan, kalau untuk tingkat

³⁵Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB .

anak muda tidak mempunyai masalah, akan tetapi bagi pemilih lanjut usia atau orang awam yang notabeneanya kurang paham mengenai partai politik mungkin akan mengalami kebingungan, soalnya ada banyak pemilihan.³⁶

Pemilihan lokasi TPS maupun tata letak TPS yang kurang ramah bagi pemilih disabilitas. Hal ini antara lain terdapat lokasi menuju tempat TPS yang jalannya belum baik, masih ada bebatuan, dan jalan yang licin. Adanya posisi meja untuk bilik suara dan kotak suara yang cukup tinggi yang tentunya menyulitkan bagi pemilih yang menggunakan kursi roda. Selain itu akses menuju bilik suara juga kurang lebar dan tempat untuk mengantre tidak memadai karena tenda yang seadanya.

Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara oleh masyarakat dari Desa Wotan, bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih kurang ramah untuk penyandang disabilitas, karena Tps nya tidak ditempatkan pada gedung, akan tetapi pada lahan kosong, sehingga jalan menuju Tps kurang bagus dan masih banyak bebatuannya.³⁷

2) Pendistribusian logistik pemilu

Terdapat masalah dalam pendistribusian logistik pemilu serentak 2019 di Kecamatan Sukolilo pati, yaitu terjadi kesalahan dalam proses pengiriman surat suara. Kabupaten Pati yang merupakan dapil 5 yang terdiri dari Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus dan Tambakromo diberikan surat suara dapil 3. Bahkan surat suara tersebut sudah selesai dicoblos. Akhirnya Panwascam Sukolilo terjun langsung untuk menangani problematika tersebut. Bahwa jika terjadi masalah dalam pengiriman logistik pemilu, harus melihat acuan pada peraturan KPU maupun Perbawaslu, bahwa disitu harusnya kalau sudah dicoblos hitungannya masuk ke hitungan partai, bukan masuk ke perhitungan calonnya. Selain itu terdapat keterlambatan proses

³⁶ Hasil Wawancara dengan Hartatik sebagai Sedulur Sikep Baturejo, pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Nina Aprilia sebagai masyarakat Islam Wotan, pada 6 Juli 2021, pukul 12.00 WIB.

pengiriman surat suara di Desa Wotan dan Desa Baturejo. Keterlambatan surat suara di sebabkan oleh akses kedua desa tersebut yang berada di pedalaman, yang menyebabkan terjadi gangguan dalam proses pengiriman.

Hal tersebut di dapat dari hasil wawancara kepada Panwascam, bahwa pelaksanaan kemarin terdapat sedikit permasalahan, di Kabupaten Pati untuk legislatif dapil 5 itu terdiri dari Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus dan Tambakromo. Pada saat itu ada kesalahan pengirimansurat suara, yang dapil 3 dikirim ke dapil 5, bahkan surat suara tersebut sudah selesai dicoblos. Akhirnya PPK tidak berani menengahi terus sebagai Panwascam terjun langsung ke situ. Panwascam mengatakan kalau ada permasalahan seperti itu, acuannya harus pada peraturan Kpu maupun Perbawaslu, bahwa harusnya kalau surat suara sudah dicoblos hitungannya harus masuk ke partai, bukan masuk ke calonnya.³⁸

3) Rekapitulasi penghitungan suara

Terdapat kesalahan penulisan dan pengisian pada formulir C1. Dalam penulisannya sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, tandatangan harus ditulis secara manual. Bagian atas form C1 harus diisi dengan daerah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan kondisi yang capek, banyak penulisan yang salah. Setelah pengisian form C1 selesai lanjut menyortir formulir tersebut ke amplop. Isi amplop tersebut terdiri dari berita acara, C1 hologram, amplop C1 tidak hologram, amplop C1 Kecamatan, dan amplop C1 Kelurahan serta amplop KPUD. Jika jumlah surat suara yang banyak dan harus dikerjakan secara bersamaan, maka proses penulisannya juga lebih rumit.

4) Beban kerja petugas pemilu serentak 2019

Beberapa kesalahan yang di dapat dalam proses pemilihan sampai pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Desa Wotan dan Desa Baturejo menimbulkan beban kerja untuk para penyelenggara pemilu serentak yaitu di tingkat KPPS, PPK dan PPS. Para penyelenggara

³⁸Hasil Wawancara dengan Kuraji sebagai Panwascam Sukolilo, pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.

dituntut untuk untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Beban kerja disebabkan karena ada lima format jenis surat suara yang dilaksanakan dalam waktu secara bersamaan. Tugas KPPS dan PTPS tidak hanya dilaksanakan pada hari H pemungutan suara, akan tetapi sudah mulai bertugas H-3 sebelum pelaksanaan pemilu serentak. Tugas tersebut mulai dari pembersihan balihoo, proses penerimaan dan penanganan logistik pemilu, dan membangun lokasi TPS, dilanjutkan hari berikutnya untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara untuk lima jenis surat suara. Beban kerja yang berat terdapat pada proses penghitungan suara yaitu mulai dari proses menghitung, menyusun, mengumunkan dan mencatat jumlah surat suara hasil pemungutan. Sehingga mulai dari persiapan sampai penghitungan dan pendistribusian hasil pemungutan menghabiskan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jam 11 malam proses tersebut baru selesai.

Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan KPPS Desa Wotan dan Desa Baturejo, bahwa terkait pelaksanaan pemilu serentak kemarin lancar, tetapi terdapat banyak kendala yang dihadapi, termasuk kendala Kpps yang banyak merasakan pegal sampai ada yang sakit juga setelah pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Karena dari pagi sudah harus bertugas sampai dengan larut malam baru selesai. Perlu pembenahan untuk efisiensi waktu pemilu serentak, tetapi untuk petugasnya mungkin harus lebih banyak lagi. Misalnya untuk pemilihan presiden diadakan Tps sendiri. Apalagi ada rencana bahwa pemilu serentak akan dijadikan satu dengan pemilihan bupati, kalau bisa ada Tps nya sendiri atau ada petugasnya sendiri, sehingga petugas tidak begitu kelelahan.³⁹

- 5) Dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Desa Wotan dan Sedulur Sikep Desa Baturejo masih banyak ditemui kasus money politik. Money politik di Indonesia sendiri sudah membudidaya di pemerintah dan masyarakatnya. Bahkan kalau tidak ada uang, akan mengurangi jumlah partisipasi masyarakat dalam

³⁹ Hasil Wawancara dengan Syahrul Ferdiansyah sebagai Kpps Wotan, pada tanggal 8 Juli 2021, pukul 12.00 WIB.

memilih. Di Desa Wotan pemberian simpatisan berupa uang dilaksanakan di hari sebelum pelaksanaan pemilu serentak, bahkan banyak dari masyarakat yang menerima pemberian simpatisan tersebut. Masyarakat Wotan sadar bahwa money politik itu tidak baik bagi kelangsungan pemerintahan di Indonesia, tetapi masyarakatnya masih tetap menerima bentuk pemberian tersebut, karena merasa bahwa money politik memang sudah membudidaya di Desa Wotan.

Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wotan, bahwa masih banyak masyarakat yang mendapatkan pemberian simpatisan berupa uang, pemberian tersebut diberikan sekitar H-1 sebelum pelaksanaan pemilu serentak, tetapi juga ada yang diberikan H-2 sebelum pelaksanaan. Menurut Nina Aprilia sebagai masyarakat Wotan mengenai *money politic* kurang setuju, karena kalau tidak ada uang masyarakat tidak akan memberikan suaranya (golput), dan masyarakat akan memilih mana calon yang memberikan lebih banyak uangnya. Jadi adanya money politik sudah menjadi budaya masyarakat di sini, dan itu akan susah sekali jika dihilangkan.⁴⁰

Dalam konteks keberagaman, Sedulur Sikep Desa Baturejo termasuk dalam kategori penganut Islam abangan sebagaimana klasifikasi teori oleh Clifford Geertz. Abangan merupakan golongan penduduk Jawa yang mempraktikkan Islam dalam versi sinkretis. Sedulur sikep merupakan penghayat kepercayaan, dalam KTP kolom agamanya masih diberi status Islam, akan tetapi nilai-nilai Islam lokal masih identik dengan Islam kejawen atau Islam abangan. Pola reproduksi nilai-nilai budaya lokalnya berbasis pada nilai ajaran Ki Samin Surosentiko digunakan untuk bertahan diantara perubahan sosial yang terjadi disekitarnya, salah satunya disebutkan bahwa komunitas Surosentiko harus bersikap jujur dan melawan ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di sedulur sikep, bahwa mereka sangat melawan ketidakadilan dan sangat jujur dalam proses pelaksanaan pemilu serentak 2019. Menjelang

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Nina Aprilia masyarakat Islam Wotan, pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 12.00 WIB.

pemilu serentak, sedulur sikep desa baturejo mendapatkan suatu bentuk money politik, akan tetapi mereka sudah sadar bahwa money politik itu merupakan sebuah pelanggaran besar. Sedulur Sikep tidak menerima suatu bentuk pemberian apapun dari simpatisan termasuk pemberian berupa uang, mereka memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Bahkan tokoh Sedulur Sikep melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya untuk menghindari pelanggaran tersebut. Dari hasil sosialisasi itu, para kepala keluarga mengingatkan kepada suadaranya bahwa tidak boleh melakukan pelanggaran apapun selama pemilu serentak 2019. Karena pada dasarnya Sedulur Sikep merupakan kelompok masyarakat yang sangat tradisional, salah satu yang dipelajarinya yaitu tentang tata karma baik itu menyangkut sopan santun kepada orang lain, serta mereka mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk. Sehingga hal yang didapat tersebut diterapkan di kehidupan sehari-harinya.

Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan Sedulur Sikep Desa Baturejo, bahwa Hartatik pernah ikut dalam sosialisasi pemilihan, dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang *money politic*, bahwa seseorang yang melakukan *money politic* itu dikatakan sebagai pelanggaran. Akan tetapi pihak-pihak terkait yang ikut dalam pelaksanaan politik tetap melaksanakan adanya *money politic*. Dari keluarga Hartatik sendiri tidak setuju dengan adanya *money politic*, semua keluarganya sudah diberikan pemahaman bahwa tidak boleh menerima suatu bentuk pemberian apapun termasuk pemberian uang. Harus memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani, yang menurutnya calon tersebut baik untuk kedepannya. Dalam hati Hartatik berkata, bahwa aturan yang buat pemerintah tetapi dilanggar sendiri, *Lakon koyo ngono kok dilakoni terus* (Pelanggaran seperti itu kok dilanggar terus) ngeluh dengan dirinya sendiri.⁴¹

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Panwascam Sukolilo , Pada 5 Juni 2021, Pukul 10.00 Wib.